

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Yuni Tri Lestari 2015

Meneliti adanya pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening*. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang mendapat *Sustainability Reporting Award (ISRA)* periode 2011-2013 yang terdaftar pada bursa efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian terdiri dari 20 perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan saham instutional, kepemilikan saham manajerial, dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel independen, sedangkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening* dan variabel dependen dari penelitian ini ialah Kinerja Keuangan Perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur, yaitu dengan membandingkan nilai *standardized coefficient* persamaan regresi 1 dan *standardized coefficient* persamaan regresi 2.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Variabel kepemilikan saham institusional, ukuran dewan komisaris berpengaruh *signifikan* terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi kepemilikan saham manajerial dan komite audit tidak

berpengaruh *signifikan* terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan *Corporate social responsibility* berpengaruh *signifikan* terhadap kinerja keuangan perusahaan

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Yuni Tri Lestari adalah

- 1) Menggunakan kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional dan dewan komisaris sebagai variabel bebas .
- 2) Meneliti kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA.
- 3) Sampel perusahaan menggunakan perusahaan penerima Indonesia *Sustainability Reporting Award*.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Yuni Tri Lestari adalah

- 1) Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel bebas ukuran dewan direksi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran dewan direksi.
- 2) Penelitian terdahulu menggunakan *corporate social responsibility* sebagai variabel *intervening* sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening*.
- 3) Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis jalur sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

2. Hisnol Jamal¹, Sutrisno T, Imam Subekti, Prihat Assih 2015

Penelitian ini mengambil topik tentang *The Influence of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Efficiency as Mediating Variable*. Peneliti ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA & Tobins Q), efek langsung atau tidak langsung melalui efisiensi. Sebaliknya, ada bukti empiris bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA), baik efek langsung atau tidak langsung melalui efisiensi. Namun, tanggung jawab social perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Tobins Q), efek baik langsung ataupun tidak langsung melalui efisiensi.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu :

- 1) Meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.
- 2) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu :

- 1) Menggunakan sampel perusahaan manufaktur tahun 2009-2012 sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan penerima *Indonesia Sustainability Reporting Award*.
- 2) Menggunakan efisiensi sebagai variabel moderating sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan efisiensi sebagai variabel moderating.
- 3) Variabel terikat yaitu kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) dan Tobins Q, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan *Return On Assets* (ROA).

3. Luthfilia Desy Fitriani , Dini Wahyu Hapsari 2015

Meneliti adanya pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan *Corporate Social Responsibility* sedangkan variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan metode *random effect*. Hasil dari penelitian ini ialah *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA), secara parsial Ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu antara lain :

- 1) Meneliti *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* dengan indikator dewan direksi sebagai variabel bebas.
- 2) Menggunakan variabel terikat kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA).
- 3) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu antara lain :

- 1) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan perbankan sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan yang mendapatkan *Indonesia Sustainability Reporting Awards*.
- 2) Penelitian terdahulu menggunakan variabel komisaris independen dan komite audit sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut.

4. Intan Candradewi dan Ida Bagus Panji Sedana 2016

Topik penelitian ini yaitu Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap *Return On Asset*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap ROA. Sampel perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*. Dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu :

- 1) Meneliti pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.
- 2) Variabel terikat yaitu kinerja perusahaan yang menggunakan indikator *Return On Asset (ROA)*.
- 3) Menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda.
- 4) Perusahaan yang terdaftar di BEI

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu :

- 1) Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas dewan komisaris independen sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel dewan bebas komisaris independen
- 2) Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel bebas *Corporate Social Responsibility* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel bebas.
- 3) Penelitian sekarang menggunakan perusahaan yang memperoleh *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan otomotif

5. **Sulistyowati 2017**

Penelitian ini mengambil topik pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2012-2014. Sampel yang digunakan ialah teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 30 perusahaan. Dan menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

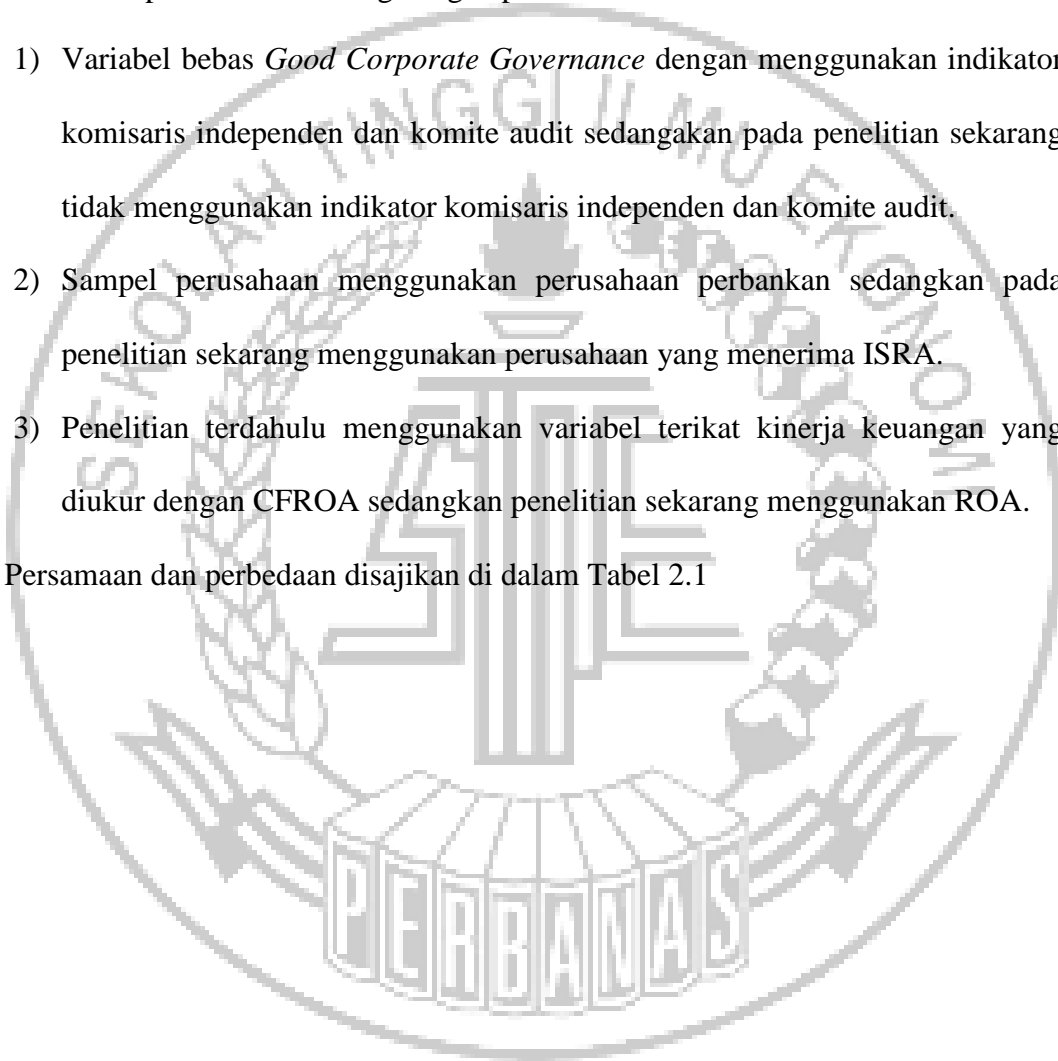
Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah :

- 1) Variabel bebas *Good Corporate Governance* dengan indikator dewan direksi dan dewan komisaris.
- 2) Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.
- 3) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah :

- 1) Variabel bebas *Good Corporate Governance* dengan menggunakan indikator komisaris independen dan komite audit sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan indikator komisaris independen dan komite audit.
- 2) Sampel perusahaan menggunakan perusahaan perbankan sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan perusahaan yang menerima ISRA.
- 3) Penelitian terdahulu menggunakan variabel terikat kinerja keuangan yang diukur dengan CFROA sedangkan penelitian sekarang menggunakan ROA.

Persamaan dan perbedaan disajikan di dalam Tabel 2.1



Tabel 2. 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Sampel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Yuni Tri Lestari	2015	Kinerja Keuangan	Kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit	Perusahaan yang mempublikasikan annual report dan menerima ISRA	Analisis Jalur	Kepemilikan saham institusional, dewan komisaris dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan Kepemilikan saham manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan
2.	Hisnol Jamall, Sutrisno T, Imam Subekti, Prihat Assih	2015	Kinerja Keuangan perusahaan	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Perusahaan Manufaktur	Regresi linier berganda	<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

3.	Luthfilia Desy Fitriani , Dini Wahyu Hapsari	2015	Kinerja Keuangan	Ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	Analisis regresi panel	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA), secara parsial Ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).
4.	Intan Candrade wi dan Ida Bagus Panji Sedana	2016	Return On Asset	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris.	Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010-2014	Regresi linier berganda	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> . Dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> .

5.	Sulistiyowati	2017	Kinerja keuangan	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan	Perusahaan perbankan	Regresi linier berganda	Dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
----	---------------	------	------------------	--	----------------------	-------------------------	---

Sumber : Yuni Tri Lestari (2015), Hisnol Jamali, et al (2015), Luthfilia Desy Fitriani dan Dini Wahyu Hapsari (2013), Intan Candradewi dan Ida Bagus Panji Sendana (2016), Sulistiyowati (2017)

2.2 Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan beberapa teori yang mendasari. Teori tersebut antara lain yang membahas tentang kinerja perusahaan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* serta teori yang dikemukakan oleh para ahli.

2.2.1 Kinerja Perusahaan

Istilah kinerja dikaitkan dengan kondisi perusahaan. Kinerja perusahaan adalah gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Amirullah, 2015:206). Kinerja perusahaan memiliki pengertian sebagai hasil dari sebuah kegiatan manajemen di sebuah perusahaan. Hasil dari kegiatan manajemen ini kemudian dijadikan sebuah parameter atau tolok ukur untuk menilai keberhasilan manajemen sebuah perusahaan dalam hal pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam periode tertentu.

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah agar karyawan termotivasi dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada dan juga bermanfaat bagi para investor dalam pengambilan keputusan karena informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi para investor. Ukuran umum yang digunakan investor dalam penilaian kinerja perusahaan adalah analisis rasio

keuangan. Terdapat beberapa macam rasio keuangan, diantaranya yaitu :rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

1. Rasio Profitabilitas

Ada beberapa macam rasio yang dapat digunakan :

a) *Profit Margin*

Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai (Hamdani, 2016:132).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b) *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset merupakan rentabilitas ekonomi yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba setelah bunga dan pajak (Hamdani, 2016:133).ROA menunjukkan sejauh mana tingkat pengembalian perusahaan dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan.

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots(1)$$

Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah rasio antara laba bersih terhadap total equity. Semakin tinggi ROE maka menunjukkan semakin baik perusahaan dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba perusahaan atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hamdani, 2016:135).

ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \dots\dots(2)$$

2.2.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori ini pertama kali ditemukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik perusahaan yang digunakan selama ini. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara *agent* dan *principal* (Hamdani, 2016:30). *Principal* merupakan investor atau pemegang saham sedangkan *agent* merupakan pihak manajemen yang mengelola perusahaan.

Konflik kepentingan terjadi karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemilik perusahaan (*principal*), disisi lain manajer juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraanya sendiri. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan manajer bertindak untuk dirinya sendiri

sehingga tidak sejalan dengan keinginan investor atau *principal*. Pemisahan ini menyebabkan setiap risiko yang ditanggung oleh perusahaan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham karena manajer hanya sebagai pengelola perusahaan tidak mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap untung ataupun rugi perusahaan. Manajer akan cenderung bertindak untuk kesejahteraannya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Teori agensi menjelaskan tentang masalah asimetri informasi. Informasi internal dan prospek kedepan perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer dibandingkan dengan pemegang saham atau *principal*, karena manajer bertindak sebagai pengelola perusahaan. Adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Biaya *Monitoring*, merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Biaya monitoring akan semakin besar ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar.
2. Biaya *Bonding*, merupakan biaya untuk menjamin bahwa *agent* tidak akan bertindak merugikan *principal*, atau dengan kata lain untuk meyakinkan *agent* bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.

3. Biaya kerugian residual, merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

2.2.3 Teori Legitimasi (*legitimacy Theory*)

Menurut teori ini bagi perusahaan, masyarakat adalah faktor strategis dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis dimana keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan di sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Hadi,2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang masyarakat berikan ke perusahaan dan sesuatu yang dicari atau diinginkan oleh masyarakat (Hadi, 2011:87). Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.

Tingginya senjangan legitimasi sebagai akibat ketidaksesuaian antara aktivitas operasi perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat memunculkan tekanan dari *stakeholder*. Pengurangan senjangan legitimasi bisa dilakukan dengan strategi legitimasi, dengan cara tanggungjawab social dan memperluas pengungkapan, termasuk pengungkapan social sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan operasi perusahaan atas berbagai dampak yang ditimbulkan. Menurut Hadi(201:92), upaya yang perlu dilakukan perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif yaitu, dengan cara : melakukan identifikasi dan

komunikasi dengan public, melakukan komunikasi tentang masalah nilai social kemasyarakatan dan lingkungan, dan membangun persepsinya tentang perusahaan serta melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggungjawab social.

2.2.4 Teori Stakeholder(Stakeholder Theory)

Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute (SRI)* pada tahun 1963. Stakeholder didefinisikan sebagai semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi,2011:93). Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan harus memberikan manfaat bagi stakeholder (kreditor, supplier, konsumen, masyarakat, pemegang saham, pemerintah, analis dan pihak lain). Tanggungjawab perusahaan yang semula fokus pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih memperhitungkan factor-faktor social terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan, sangat bergantung dengan dukungan *stakeholder* (Hamdani,2016:34-35). Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah "Teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan".

2.2.5 *Good Corporate Governance*

Cadbury Committee tahun 1992 pertama kali mengenalkan istilah *Good Corporate Governance (GCG)* atau *Corporate Governance (CG)* dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya terhadap para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya (Yuni Tri Lestari, 2015).

Good Corporate Governance menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* adalah salah satu pilar dari ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang melaksanakan usahanya di suatu Negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan usaha yang kondusif. Oleh karena itu, untuk menunjang pertumbuhan stabilitas ekonomi, maka perusahaan-perusahaan diharapkan dapat menerapkan GCG.

Penemuan penting adalah bahwa dalam negara berkembang perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* lebih memiliki arti dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk, perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar.

Menurut Forum *Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, *Good Corporate Governance (GCG)* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan.

Pada umumnya konsep GCG berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang saham) yakin kepada manajer bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi para pemilik dan yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham (Waryanto,2010). Konsep *Good Corporate Governance* ini muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Permasalahan ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal sebagai pelaku utama dalam perusahaan (*agency problem*). Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu dalam arti sempit yang berarti sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham sedangkan sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai *a web of relationship*, tidak hanya hubungan perusahaan dengan pemilik atau pemegang sahamnya melainkan perusahaan dengan pihak *stakeholder* (Hamdani,2016:20).

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Secara teoritis *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan juga meningkat, dan dapat mengurangi resiko,apabila dewan komisaris mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan *Good Corporate Governance* pada umumnya mampu menarik minat investor (Ariesta, 2015).

Agar investor luar negeri dan dalam negeri tertarik dan menginvestasikan dananya kepada perusahaan, maka perusahaan dapat menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG juga merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham untuk tercapainya tujuan perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya. Good corporate governance dilakukan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi akan segera diperbaiki.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya corporate governance yang baik adalah

1. **Transparansi (Transparency)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan untuk mengemukakan informasi yang relevan yang berhubungan dengan perusahaan.
2. **Kemandirian (Independency)**, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas (Accountability)**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.6 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG dengan baik (Hamdani,2016:82). Tetapi dalam pengambilan keputusan operasional, dewan komisaris tidak boleh ikut serta. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, perusahaan diwajibkan memiliki sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Sehingga jumlah anggota dewan komisaris masing-masing perusahaan berbeda-beda karena jumlah dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen ialah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non independen berasal dari pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi memiliki arti bahwa pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan

kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lain dan direksi serta dengan perusahaan itu sendiri.

Dewan komisaris di dalam perusahaan lebih fokus pada fungsi pengawasan dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antaradewan direksi dan pemegang saham. Sehingga, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan dewan direksi sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Menurut Hamdani (2016:82), Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan dengan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, cepat, tepat, serta dapat bertindak independen
- b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan semua pemangku kepentingan.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberi nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran dewan komisaris} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris} \dots\dots(3)$$

2.2.7 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan dewan yang bertanggungjawab dan bertugas dalam mengelola perusahaan. Anggota dewan direksi dapat terdiri dari seseorang

yang mempunyai perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan (Sulistyowati, 2017). Masing-masing anggota dewan direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian wewenang masing-masing. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota dewan direksi merupakan tanggungjawab bersama. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek ditentukan oleh dewan direksi. Dewan direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas yang ditentukan UUPT, anggaran dasar, dan RUPS serta dalam pengawasan dewan komisaris.

Ukuran dewan direksi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran dewan direksi} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi} \dots\dots(4)$$

2.2.8 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti dewan direksi dan dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah agensi karena kinerja manajer akan lebih baik seiring dengan peningkatan kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan saham manajerial akan menuntut manajer akan selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena hasil dari keputusan tersebut akan memberikan dampak secara langsung pada saham yang dimiliki oleh manajer (Intan *et al*, 2016) Manajer akan berusaha lebih giat untuk memperbaiki kinerja perusahaan, yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaannya sendiri. Kepemilikan saham manajerial merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan laporan pertanggungjawaban social perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan *image* perusahaan dimata para *stakeholders*. Kepemilikan manajerial diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan manajer) dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Kepemilikan Manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots \dots (5)$$

2.2.9 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseroan pribadi.

Adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional diharapkan dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pengungkapan

laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional maka diharapkan semakin luas pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots\dots(6)$$

2.2.10 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility merupakan tanggungjawab moral perusahaan kepada para *stakeholdernya*, terutama kepada masyarakat di wilayah sekitar dimana perusahaan beroperasi. Suatu perusahaan dapat dikatakan bertanggungjawab secara sosial apabila perusahaan memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya merealisasikan keuntungan perusahaan saja melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun lingkungan sosialnya (Hamdani,2016:174).

Sedangkan menurut Hadi (2011) tanggung jawab sosial perusahaan adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Definisi tersebut pada dasarnya bagaimana cara perusahaan mengelola, baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendapat Friedman menyatakan bahwa tujuan utama korporasi adalah hanya untuk memperoleh profit semata-mata semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep *triple*

bottom line (profit, planet, people) yang dikemukakan oleh John Elkington (1997) makin masuk ke dalam *mainstream* etika bisnis (Edi Suharto,2008).

Perkembangan tanggungjawab social perusahaan yang dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang terkenal dengan “*The Triple Bottom Line*” yang dimuat dalam buku “*Canibalts with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit yang diburu, melainkan harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

CSR merupakan sebuah konsep mengenai perlunya sebuah perusahaan untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitar perusahaan berada dan *stakeholder* lainnya. Pelaksanaan CSR akan membuat perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek saja melainkan perusahaan juga turut berkontribusi bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat dari aktivitas CSR.

Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi yang mencakup isu-isu pokok berikut ini:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek kegiatan institusi yang sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak Asasi Manusia

7. *Organizational Governance*

Oleh karena itu, apabila perusahaan hanya memfokuskan pada isu-isu tertentu saja, seperti perusahaan hanya memperdulikan isu lingkungan dan tidak memikirkan isu ketenagakerjaan atau isu-isu lainnya, maka perusahaan bisa dikatakan belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh dan menyeluruh.

CSR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j} \dots\dots\dots(7)$$

Dimana :

Indeks CSRI_j : *Corporate Social Responsibility Index* Perusahaan j

$\sum X_{ij}$: 1 = jika item diungkapkan, 0 = jika item tidak diungkapkan.

N_j : jumlah item yang diungkapkan perusahaan, $N_j = 91$

2.2.11 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasialannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pada pencapaian tujuan perusahaan. Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan dalam kinerja perusahaan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan (Ratna Wardhani, 2007). Sama halnya dengan pendapat Sulistyowati (2017) yang menyatakan semakin banyaknya dewan komisaris maka fungsi pengawasan terhadap dewan direksi akan semakin baik, serta masukan dan nasehat untuk dewan direksi juga menjadi lebih banyak, sehingga kinerja dari manajemen akan semakin baik dan berpengaruh kepada kinerja perusahaan yang semakin meningkat. Sedangkan menurut Yuni Tri Lestari (2015) semakin banyak dewan komisaris akan semakin kesulitan dalam menjalankan peranannya karena semakin banyak dewan komisaris maka semakin sulit dalam berkomunikasi dan berkoordinasi antara anggota dewan komisaris sehingga mengakibatkan semakin buruk kinerja pada perusahaan.

2.2.12 Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja perusahaan

Kebijakan yang akan diambil atau strategi dalam jangka pendek dan jangka panjang ditentukan oleh dewan direksi. Dalam GCG, dewan direksi merupakan mekanisme yang sangat penting, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Sehingga semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Dengan kata lain, dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Ratna Wardhani, 2007). Hasil penelitian Luthfilia *et al* (2015), dengan menambah jumlah dewan direksi maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan direksi diatas rata-rata maka juga akan memiliki rasio ROA diatas rata-rata. Sehingga menunjukkan bahwa dewan direksi mampu menjalankan kewajiban dan wewenangnya dengan baik. Dalam memimpin perusahaan dewan direksi juga mampu mengarahkan dan mengkomunikasikan tujuan dan visi serta misi perusahaan pada manajemen dan karyawan sehingga laba perusahaan yang diperoleh pun tinggi. Penelitian Sulistyowati (2017), banyak sedikitnya dewan direksi yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja perusahaan. Dengan demikian semakin banyak dewan direksi menimbulkan semakin banyak konflik, namun jumlah tersebut dapat memberikan alternative penyelesaian terhadap suatu masalah yang beragam antar anggota direksi sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Melainkan menurut Jensen, 1993; Lipton and Lorsch, 1992; Yermack, 1996 (dalam Sam'ani, 2008), perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar

tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit.

2.2.13 Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan

Jika manajemen memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan maka manajemen memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pemilik. Dengan demikian konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat dihindarkan. Dengan terhindarnya konflik antara pemilik dan agen maka akan terjalin kesinambungan dalam perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan *shareholder* dan *stakeholdernya*.

Semakin besar kepemilikan manajer dalam perusahaan maka manajer akan berusaha maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan (*alignment of interest*) karena manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh perusahaan (Melia dan Yulius, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Candradewi dan Ida Bagus Panji Sedana (2016), menunjukkan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin kecil peluang terjadinya konflik, karena jika pemilik bertindak sebagai pengelola perusahaan maka dalam pengambilan keputusan akan sangat berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kepentingan antara agen dan pemilik akan sejalan yaitu meningkatkan *return* perusahaan (ROA).

2.2.14 Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Dengan meningkatnya kepemilikan institusional diharapkan perusahaan dapat terus melaksanakan praktek *Good Corporate Governance* sesuai dengan yang diharapkan investor institusional. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dapat meningkatkan usaha pengawasan oleh pihak institusi sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer dan dapat membantu pengambilan keputusan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Intan *et al*, 2016). Sama halnya dengan penelitian Yuni Tri Lestari (2015), semakin besar kepemilikan institusional daripada kepemilikan manajerial maka memungkinkan pihak institusional untuk mengawasi tindakan manajer sehingga manajer tidak bisa bertindak sesuai dengan kepentingannya pribadi, sehingga antara manajerial dan institusional dapat saling bekerjasama dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

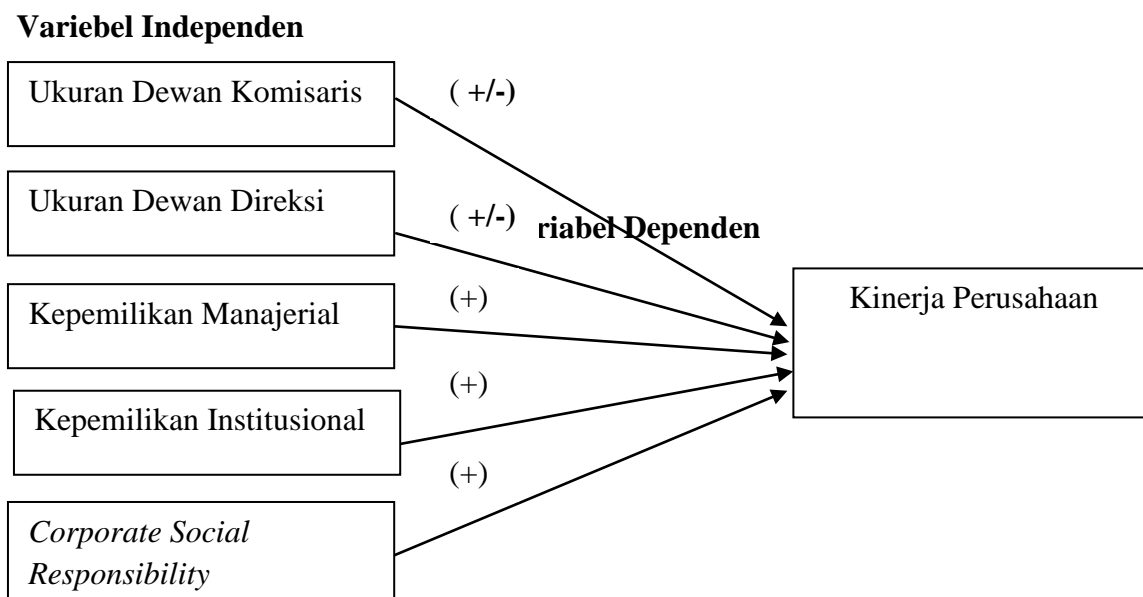
2.2.15 Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan

Corporate Social Responsibility adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan khususnya bagi masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan maka akan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, pengungkapan CSR akan meningkatkan profit bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik karena

banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengungkapkan program CSR menunjukkan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Bagi investor dan pemilik perusahaan hal ini akan memberikan keuntungan (Desak Putu Suciwati, Desak Putu Arie Pradnyan dan Cening Ardina 2016). Penelitian tersebut juga didukung dengan hasil penelitian Kadek, Gede dan Nyoman (2014) penerapan CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dimana investor akan cenderung menanamkan modalnya kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR, perusahaan yang melakukan CSR juga akan menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR. Sehingga perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja keuangan kedepannya. Sejalan dengan penelitian Yuni Tri Lestari (2015) bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR, akan banyak mendapat keuntungan seperti kesetiaan pelanggan dan kepercayaan dari investor dan kreditor. Sehingga akan memicu keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik sehingga laba perusahaan akan semakin meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROA pada tahun berikutnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan melihat kerangka pemikiran di bawah ini maka dapat diketahui variabel independen yang dipakai yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* sedangkan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori kerangka pemikiran penelitian diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan penerima

ISRA.

H₂ : Ada pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan penerima

ISRA.

H₃ : Ada pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan

penerima ISRA.

H₄ : Ada pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan

penerima ISRA.

H₅:Ada pengaruh positifCSR terhadap kinerja perusahaan penerima ISR